

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF
TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Jurusan Akuntansi*



Oleh :

Nama : DIAJENG FRASTIKA
NPM : 1805170155
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : DIAJENG FRASTIKA
NPM : 1805170155
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


Tim Penguji

Penguji I



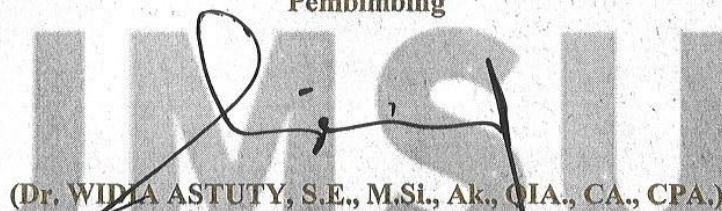
(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II



(IKHSAN ABDULLAH, SE., Ak., M.Si.)

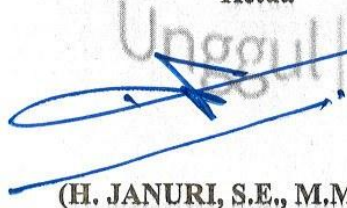
Pembimbing



(Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., CIA., CA., CPA.)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DIAJENG FRASTIKA
N P M : 1805170155
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AUDIT
INVESTIGATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN
FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PADA KANTOR PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi.

Medan, Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

(Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si, Ak, QIA, CA., CPA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

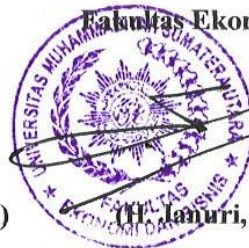
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulha Hanum, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. Lamuri, S.E., M.M., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DIAJENG FRASTIKA
NPM : 1805170155
Dosen Pembimbing : Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si, Ak. QIA, CA., CPA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah dipertajam dengan dukungan data	5 Sep 2022	
Bab 2	- Tambahkan teori pendukung - Kerangka konseptual dikembangkan	20 Sep 2022	
Bab 3	- Perjelas pendekatan penelitian - Definisi operasional dikembangkan	20 Sep 2022	
Bab 4	- Uraikan dengan jelas deskripsi variabel penelitian - Hasil analisis data dikemukakan secara sistematis - Pembahasan dikembangkan	20 Okt 2022	
Bab 5	= Lengkapi kesimpulan dan saran	4 Okt 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan skripsi	6 Okt 2022	

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Medan, Oktober 2022
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si, Ak. QIA, CA., CPA)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAJENG FRASTIKA
N P M : 1805170155
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.” Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



DIAJENG FRASTIKA

ABSTRAK

Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)

**Diajeng Frastika
Akuntansi**

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah (studi pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan asosiatif, Sumber data merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor yang bekerja pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel berjumlah 32 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan *Partial Least Square Path Modeling* (PLS-SEM) dan menggunakan alat bantu software smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci: Penerapan Audit Investigatif, Pengungkapan *Fraud* Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah**

ABSTRACT

Influence of the Implementation of Investigative Audit on Disclosure Fraud in Regional Financial Management (Study on BPKP Representatives North Sumatra Provinc)

**Diajeng Frastika
Accountant**

This study aims to: determine the effect of implementing investigative audits on fraud disclosure in regional financial management (study on representatives of BPKP North Sumatra Province. In this study the author uses an associative approach, the source of data is primary data. Data collection is done by survey method by distributing questionnaires to auditors who work for representatives of BPKP North Sumatra Province. The sampling technique used in this study is to use the purposive sampling formula so that a sample of 32 people is obtained. The data analysis technique used in this study uses Partial Least Square Path Modeling (PLS-SEM) and using smart PLS software tools. The results show that: The implementation of investigative audits has a significant effect on fraud disclosure in regional financial management.

Keywords: Implementation of Investigative Audit, Disclosure of Fraud in Regional Financial Management



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT karena berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)”** merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah tercinta dan Ibu yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena dengan izin dan ridhoNya Penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

2. Kepada Ayah dan Almh. Ibu, untuk semua Doa, semangat dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Januri S.E., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si**, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu **Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si, Ak. QIA, CA.,CPA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Kepada Sahabat terbaik yang telah mendukung dan membantu penulis dan penulisan proposal skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi khususnya Akuntansi-A, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Amin YaRabbal'alamin.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Diajeng Frastika

1805170155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah Penelitian.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Audit.....	13
2.1.2 Teori Atribusi.....	14
2.1.3 Teori Efektivitas.....	15
2.1.4 <i>Fraud</i>	16
2.1.5 <i>Fraud Triangle Theory</i>	18
2.1.6 Audit Investigatif	19
2.1.7 Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan Fraud	25
2.1.8 Pengelolaan Keuangan Daerah	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	30
2.3.1 Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
2.4 Hipotesis Penelitian	32

BAB III	METODE PENELITIAN	33
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Devinisi Operasional Variabel	34
3.2.2	Variabel Bebas (Independent Variabel).....	34
3.2.1	Variabel Terikat (Dependent Variabel).....	34
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3.1	Tempat Penelitian	36
3.3.2	Waktu Penelitian	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.5.1	Populasi Penelitian.....	38
3.5.2	Sampel Penelitian.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7	Teknik Analisis Data.....	41
3.7.1	Uji Partial Least Square	42
3.7.2	Analisa Outer Model (Model Pengukuran).....	43
3.7.3	Analisa Inner Model.....	43
3.7.4	Pengujian Hipotesis.....	44
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	49
4.1	Deskripsi Data Umum	49
4.1.1	Deskripsi Kuesioner Penelitian	49
4.1.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	50
4.1.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
4.1.4	Analisis Outer Model	58
4.1.5	Analisis Inner Model.....	61
4.1.6	Pengujian Hipotesis.....	62
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1	Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	63
BAB V	PENUTUP	66
5.1	Kesimpulan	66

5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud dalam pengelolaan keuangan Daerah	32
Gambar 4.1 Outer Model	59
Gambar 4.2 Path Coefficient.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Beberapa Kasus Korupsi yang Terjadi di Sumatera Utara pada Sektor Pemerintahan Tahun 2018 S/D Tahun 2021	2
Tabel 1.2 Potensi Penyelamatan Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	34
Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian.....	36
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Penerapan Audit Investigatif.....	42
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Pengungkapan Fraud.....	42
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert	50
Tabel 4.2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel 4.3 Deskripsi Jenjang Pendidikan Responden	51
Tabel 4.4 Deskripsi Masa Bekerja Responden	51
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Penerapan Audit Investigatif.....	52
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Pengungkapan <i>Fraud</i>	55
Tabel 4.7 Hasil AVE	58
Tabel 4.8 Hasil Reabilitas	60
Tabel 4.9 Hasil R Square	61
Tabel 4.10 Hasil Nilai t-Statistic	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi di Indonesia secara keseluruhan masih memiliki beberapa tantangan ekonomi, baik masalah ekonomi pada tingkat pribadi, keluarga maupun institusi ataupun lembaga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan tentang sulitnya ekonomi masyarakat. Hal ini diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 itu bisa menjadi bencana global. Seseorang tidak menanggapi situasi seperti itu dengan bijak dan percaya diri dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah sifat yang cenderung membuat kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perkembangan dunia usaha yang saat ini semakin pesat membawa dampak di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi akuntansi yang menjadi sumber munculnya berbagai kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dibahas, “*The Association of Certified Fraud Examiners*” atau disebut ACFE adalah organisasi yang melakukan pemeriksaan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga tingkatan yang dikenal dengan *Fraud Tree*, sebagai berikut: yaitu korupsi, penyimpangan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Jenis *fraud* yang terjadi di setiap negara berbeda-beda karena perilaku *fraud* sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum negara yang bersangkutan (Albrech, 2009).

Di negara-negara maju dengan penegakkan hukum yang berfungsi dengan baik, keadaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan cukup atau lebih dari

cukup, dan dengan demikian lebih sedikit kecurangan (Soejono, 2000). Berdasarkan survei *fraud* yang dilakukan oleh ACFE Indonesia yang melakukan kerja sama dengan P3K2P atau Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih, bahwa jumlah kasus tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia ialah sebesar 67% pada kasus korupsi, 31% pada kasus pemindahan aset dan 2%-nya lagi ada pada kasus kecurangan dalam laporan keuangan (Satria, 2020). Korupsi ditemukan hampir di setiap wilayah Indonesia, mulai dari kasus yang kecil hingga yang sangat kompleks. Sumatera Utara menjadi Provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumatera Utara terdepan dari lima Provinsi lain yang dinilai KPK tergolong paling korup (Tribun Medan/15 April 2019) Berikut ini daftar beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten/ Kota Sumatera utara tahun 2018-2021:

Tabel 1.1
Beberapa Kasus Korupsi yang Terjadi di Sumatera Utara pada Sektor Pemerintahan Tahun 2018 S/D Tahun 2021

No.	Pelaku	Tahun	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	12 ASN di Asahan	2018	Asahan	Tindak Pidana Korupsi (Pontas id/ 04 juli 2018)
2.	Bupati Nonaktif Kabupaten Batubara, OAZ	2018	Batubara	Tindak Pidana Korupsi (Pontas id/ 04 juli 2018)
3.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai AS	2018	Serdang Bedagai	Tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda di Kecamatan Dolok Masihul (Merdeka.com/ 29 November 2018)
4.	Kepala Dinas Koperindag Pemkab Tapanuli Selatan AS	2018	Tapanuli Selatan	Dugaan korupsi pembangunan pasar tradisional Situmbak, Sipirok, Tapanuli Selatan.

	dan Kuasa Pengguna Anggaran N			senilai Rp 300 juta dari pembangunan pasar yang merogoh anggaran sekitar Rp 1,3 miliar pada APBD 2014. (Medan.tribunnews.com/30 Desember 2018).
5.	Tujuh orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2019	Dairi	Tindak Pidana Korupsi (Tribun News/ 3 Januari 2019)
6.	Kepala Desa (Kades) Sampali, Percut, Deli Serdang, Sumut SA	2019	Deli Serdang	Korupsi Rp 146 miliar terkait penerbitan surat keterangan tanah PTPN-II Tanjung Morawa.(Realita Rakyat/ 8 December 2019)
7.	Empat Aparatur Sipil Negara (ASN)	2019	Karo	Tindak Pidana Korupsi (Tribun News/ 29 Januari 2019)
8.	Bupati Labuhan Batu PH	2019	Labuhan Batu	Kasus Suap (Kompas/ 4 April 2019)
9.	5 Pejabat Pemkab Labura dan Labusel	2020	Labuhan batu utara	Korupsi DBH dan PBB (Medan Bisnis/ 15 Jan 2020)
10.	Camat Babalan YP dan Sekretaris Camat Babalan RM	2020	Langkat	Kasus tindak pidana korupsi dan pemerasan dengan penerbitan Surat Rekomendasi Camat untuk pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Langkat.(Antara News/ 5 Februari 2020)
11.	10 orang pegawai negeri sipil (PNS)	2020	Binjai	Penggelembungan harga (Mark up) hingga pengadaan fiktif alat peraga SD (Heta News/ 10 Februari 2020)
12.	Manager Kantor Pos Medan	2021	Medan	Terjerat kasus tindak pidana korupsi materai 6000 (Medanposonline / 25 Januari 2021)
13.	4 aparatur sipil negara (ASN)	2021	Binjai	Terjerat dalam kasus korupsi pemeliharaan rutin jalan pada

				satuan kerja Dinas Bina Marga dan Bina konstruksi UPT Jalan dan Jembatan Binjai (Cnnindonesia.com /22 Juli 2021)
14.	Eks Kepala Bappeda Medan	2021	Medan	Terjerat kasus korupsi status DPO (detikNews/29 Desember 2021)

Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya kasus kecurangan pada instansi pemerintah di daerah Sumatera Utara masih sering terjadi dan akan terus bertambah. Terlebih pemerintah sebagai pengemban kepercayaan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, salah satunya adalah memastikan pengelolaan keuangan negara terkelola dengan baik dan *accountable*. Namun pada praktiknya, banyak terjadi kecurangan yang merugikan negara secara langsung dan tidak langsung yang dapat merugikan masyarakat. Maraknya pengungkapan praktik *fraud* terutama tindak pidana korupsi di pemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintah, hal ini menunjukkan betapa masih maraknya *fraud* di setiap level pemerintahan, tetapi disisi lain ada harapan bahwa pengungkapan tersebut menunjukkan kemauan dan tekad pemerintah untuk memperbaikinya.

Kecurangan akuntansi lainnya adalah Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) *Fraud* yang dilakukan oleh manajemen yaitu dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor yang bersifat finansial atau non finansial. Bentuk lain dari kecurangan akuntansi adalah Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) dapat digolongkan ke

dalam 'kecurangan kas' dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta *fraudulent disbursement*.

Di sinilah pentingnya adanya pengendalian intern dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan di mana peran seorang internal auditor, dengan tugas dan wewenang yang di miliki dapat berperan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada lembaga atau perusahaan tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menanggulangi kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah atau sektor publik adalah dengan melaksanakan audit investigatif dalam pemeriksaannya.

Audit investigatif adalah audit yang menggunakan unsur-unsur seperti penyidik yang harus memahami akuntansi (mereview laporan keuangan), auditing (membuktikan penyimpangan), dan hukum (keterampilan litigasi). Audit investigasi disebut juga audit khusus yang dilakukan untuk tanda-tanda tindakan kriminal seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan pembangunan. Audit investigatif ini dilakukan oleh seorang auditor yang disebut auditor investigatif. Audit investigatif juga proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti untuk mengungkapkan apakah suatu tindakan dan pelakunya terjadi sehingga dapat diambil tindakan hukum lebih lanjut. Audit Investigasi dilakukan untuk membantu para aparaturnya penegak hukum Indonesia untuk menghitung dan menganalisis kerugian negara.

Hal ini mengakibatkan tugas auditor investigatif lebih berat daripada audit umum, yang berkaitan langsung dengan proses litigasi. Selain harus memahami auditing dan akuntansi. Auditor investigasi juga harus memahami undang-undang terkait kasus pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan

negara. Jika auditor dapat menerapkan teknik-teknik audit investigatif dengan baik dan tepat, maka proses pengungkapan fraud yang dilakukan akan semakin cepat dan pelaksanaan audit akan berjalan dengan lancar. Audit investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supremasi hukum terkait *fraud* yang muncul dengan metode investigasi.

Dalam praktiknya di Indonesia, pelaksanaan audit investigatif dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah yang memiliki sertifikat *Certified Fraud Examiners* (CFE). Salah satunya yaitu BPKP adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi urusan keuangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meminimalisir dan mengungkap segala bentuk kecurangan yang terjadi. Perkembangan audit investigasi akhir-akhir ini menjadi harapan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, serta BPKP selaku APIP dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kecurangan (Wuysang et al., 2015). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian-penelitian yang mengeksplorasi tentang penerapan audit investigatif dalam keefektifan fungsinya terhadap pengungkapan *fraud*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, juga bertugas untuk mengawasi realisasi anggaran daerah yang menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 dan Inpres No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern.

BPKP dalam melaksanakan audit yang sebagaimana diamanatkan dalam PERMENPAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 mendasarkan pada standar audit yang telah ditetapkan termasuk standar umum audit kinerja dan audit investigatif. Standar audit yang diterapkan selain memberikan jaminan kualitas audit juga untuk menghindari adanya tuntutan dan ketidakpuasan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Untuk mengungkap adanya kecurangan, auditor harus menjaga sikap profesional. Karena semakin tinggi tingkat profesional auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor untuk mengekspos kecurangan. Begitu pula sebaliknya, semakin kurang profesionalnya audit maka semakin rendah kemampuan mengungkap kecurangan (Widiyastuti dan Sugeng, 2009).

Di setiap provinsi memiliki BPKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. BPKP Sumatera Utara melakukan tugasnya dengan cara menganalisis dan memeriksa laporan keuangan instansi pemerintah. Proyek-proyek yang diambil oleh pemerintah dan perusahaan swasta yang modal terbesarnya dimiliki oleh pemerintah. Sebelum melaksanakan tugasnya BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki empat bagian yang memiliki objek pemeriksaan yang tidak sama antara satu dengan yang lain seperti Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat atau biasa disingkat dengan IPP, Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah atau biasa disingkat dengan APD , Bidang Akuntan Negara atau biasa disingkat dengan AN dan bagian investigasi. Dari

semua bidang-bidang di atas bidang investigasi yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah. Berikut adalah uraian potensi penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2
Potensi Penyelamatan Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Audit investigasi	11.604.692.261,00	1.824.234.438,00	296.973.976,62
2.	Audit perhitungan kerugian keuangan negara	15.936.701.756,00	26.060.187.947,57	2.485.987.491,59
	Jumlah	27.541.394.017,00	27.884.442.385,57	2.782.961.468,21

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan BPKP Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Kenaikan jumlah perkara kasus korupsi berbanding lurus dengan semakin besarnya kerugian yang dialami negara khususnya di daerah Sumatera Utara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara melaporkan hasil investigasinya selama tahun 2018-2020 terkait kerugian negara akibat ulah para koruptor. kerugian negara pada 2018-2020 akibat korupsi sebesar Rp 58,2 Miliar (<https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/3958/Laporan-Hasil-Pengawasan.bpkp>)

Fenomena *fraud* sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Berdasarkan Loebbecke et al (1989) dalam Koroy (2008), kecurangan lebih sulit dideteksi karena biasanya melibatkan persembunyian (*concealment*). Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kerugian dalam jumlah yang besar menjadi salah satu ancaman bagi

perekonomian negara dan terus muncul tanpa bisa dihentikan sangatlah perlu untuk dilakukan suatu tindakan dengan tujuan utama untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kerugian yang semakin tak terkendali. Upaya Pengungkapan *Fraud* ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai audit investigatif. Berdasarkan kasus *fraud* yang telah dijelaskan di atas, berbagai metode penyelidikan telah dilakukan untuk mengungkap *fraud*. Onodi, et. al. (2015) berpendapat bahwa audit investigasi merupakan solusi utama guna mencegah terjadinya *fraud* yang merugikan banyak pihak dengan jumlah nominal yang tidak sedikit (Sayyid, 2014).

Penelitian Sayyid (2014), menyatakan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif berperan signifikan dalam pemeriksaan kasus-kasus *fraud* (kecurangan). Akuntansi forensik dan audit investigatif dapat memberikan pembuktian yang sah secara hukum dalam hal pemeriksaan kasus-kasus *fraud*.. Penelitian yang membahas variabel profesionalisme auditor dilakukan oleh Widiyastuti dan Sugeng (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan profesionalisme akuntan forensik berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian lain pula dilakukan oleh Njanike, et. al. (2009), Akenbor (2014), Enofe, et. al. (2015), audit investigasi merupakan metode yang efektif pula dalam mendeteksi *fraud*. Audit investigasi bisa membantu untuk mengidentifikasi segala bentuk tindakan modus. Audit investigasi ialah keahlian yang dimiliki seseorang akuntan forensik dalam proses penyidikan (Rozali dan Darliana, 2015).

Agar pelaksanaan prosedur audit investigasi menjadi efektif, auditor penyidik harus memiliki kapasitas yang cukup untuk membuktikan adanya kecurangan. Kemampuan ini disertai dengan kesabaran dan berpikir analitis, berpikir cerdas dan berpartisipasi dalam investigasi dan laporkan temuan. Tuanakotta (2010:104) menjelaskan kapasitas auditor yang memadai dapat mendukung keberhasilannya, seperti: Memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis dan sikap mental.

Auditor Investigasi tidak hanya harus memiliki kapasitas yang cukup bidang auditing dan akuntansi, tetapi juga harus memahami hukum dan peraturan perundang-undangan (Karyono, 2013:132). Selain kompetensi yang memadai, pengalaman auditor investigatif diyakini dapat mempengaruhi tingkat di mana auditor melakukan prosedur audit yang efektif untuk menunjukkan kecurangan. Berdasarkan Novianti dan Bandi (2011) Pengalaman yang disebutkan di sini adalah pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan dari segi lamanya waktu, penugasan audit di lapangan, dan jumlah tugas audit yang dilakukan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)”***. Penulis tertarik meneliti di BPKP, karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya ini tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi juga dibantu oleh badan non departemen yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya di Sumatera Utara akibat adanya *fraud* yang dilakukan secara sengaja oleh banyak pihak, baik pihak pemerintah maupun swasta. Sehingga sangat diperlukan tindakan dengan tujuan untuk mengurangi/meminimalisir adanya kerugian yang semakin tidak terkendali.
2. Ada banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Sumatera Utara yang Sebagian besar tersangkanya adalah Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini akan berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Terjadinya peningkatan kerugian keuangan negara berdasarkan audit investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Hal ini telah dianggap sebagai penyebab akar masalah, seperti biaya ekonomi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak lancar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat Batasan masalah agar lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan penelitian. Pada penelitian ini penulis terbatas pada variabel audit investigatif dan pengungkapan *fraud*. Adapun data-data yang digunakan untuk penelitian ini

berasal dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: “Apakah penerapan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?”

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta memperluas wawasan mengenai penerapan audit investigatif atas pengungkapan kasus kecurangan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah terutama di BPKP Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam penerapan teori dengan yang terjadi di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Teori Audit

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yang diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang telah diaudit dapat lebih dipercaya oleh pemakai informasi laporan. Mulyadi (2014:9) menyatakan: *“Audit adalah sebuah proses Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, Untuk menentukan tingkat kepatuhan antara kriteria dan standar yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”*.

Arens, et al (2011) juga menjelaskan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti informatif untuk menentukan dan menunjukkan tingkat kesamaan antara informasi dan prosedur, dan audit yang ada harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi dan mandiri. Pemeriksaan atau auditing dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif proses

sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

Dari pengertian auditing tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses investigasi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk mendapatkan bukti yang relevan dengan tujuan untuk menentukan tingkat relevansi antara pernyataan dan mendapatkam kriteria, kemudian selanjutnya mengkomunikasikan dalam bentuk laporan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya, yang menjelaskan bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang “menyebabkan” apa yang mendasarinya. Teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku manusia, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu dihasilkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang dipengaruhi secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang dipengaruhi secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu dipaksa untuk berperilaku karena situasi.

Teori atribusi dalam penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam mencapai prosedur pengendalian yang efektif. Ada banyak faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi kompetensi seorang auditor, dan kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan menyesuaikannya dengan pengalaman auditor

sebelumnya, di mana hal ini menjadi kunci efektivitas tercapainya penerapan prosedur audit dalam mengungkapkan kecurangan.

2.1.3 Teori Efektivitas

Martani dan Lubis (1987:55) menyatakan bahwa efektivitas merupakan faktor penting dalam bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, suatu organisasi dianggap efektif ketika mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas konseptual sangat penting bagi suatu organisasi karena merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mengukur efektivitas bukanlah tugas yang mudah mengingat tujuan yang berbeda dari setiap organisasi dan keragaman tujuan dari organisasi itu sendiri. Pencapaian suatu tujuan dari sekumpulan pilihan atau beberapa pilihan lain disebut juga dengan efektivitas.

Efektivitas kerja suatu organisasi sangat bergantung pada efektivitas kerja orang-orang yang bekerja di organisasi yang diberikan layanan oleh organisasi tersebut (Siagian, 1987: 60). Berdasarkan pengertian di atas, efektivitas pelaksanaan prosedur audit untuk mencegah dan mengungkapkan kecurangan dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan audit melalui penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada. Di antara sumber daya yang dimiliki oleh auditor adalah keterampilan dan pengalaman yang telah diperolehnya. Efektivitas pemeriksaan juga diartikan sebagai tercapainya atau selesainya pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemeriksaan tersebut efektif dan efisien.

2.1.4 Fraud

Menurut Auditing Standards (PSA) No. 70, *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, dan *error* dan *irregularities* didefinisikan sebagai kesalahan dan ketidakberesan karena PSA sebelumnya, PSA No.32. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* mencakup setiap kegiatan kriminal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penipuan sebagai tindakan utama. Lebih khusus lagi, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *fraud* sebagai salah mengatakan kebenaran atau menyembunyikan fakta penting untuk menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang merugikan.

Oleh karena itu, dari pengertian ini, *fraud* adalah penipuan, kecurangan dan aktivitas ilegal yang disengaja atau sadar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, jika suatu tindakan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, merugikan orang lain, dan dilakukan secara tidak wajar, melawan hukum, atau dengan cara yang melanggar hukum, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *fraud* (Tuanakotta, 2010).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *fraud (occupational fraud)* dalam bentuk *fraud tree* yang terdiri dari tiga bentuk utama:

a. *Corruption* (Korupsi)

Istilah ini berbeda dengan hukum korupsi di Indonesia. *corruption* dalam *occupational fraud* terdiri dari empat bentuk: konflik kepentingan (*conflicts on interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan keuangan (*economic extortion*)

b. *Asset misappropriation* (Penyalahgunaan aset)

berupa penjarahan uang tunai (*cash misappropriation*), pencurian uang kas ditangan (*theft of cash on hand*), pencurian kas masuk (*theft of cash receipts*), dan penggelapan (*fraudulent disbursements*). Bisa juga berupa penjarahan asset bukan kas (*inventory and all other assets*) berupa penyalahgunaan (*misuse*) dan pencurian (*larceny*).

c. *Financial statement fraud* (Kecurangan laporan keuangan)

Merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen melalui salah saji material laporan keuangan berupa penilaian aset bersih/laba bersih yang terlalu tinggi dan penilaian aset bersih/laba bersih yang terlalu rendah.

Siapapun bisa melakukan tindakan *fraud*, ditinjau dari pelaku *fraud* maka *fraud* dapat digolongkan sebagai berikut (Karyono, 2002):

1. Kecurangan manajemen atau yang biasa dikenal dengan kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau status sosial yang tinggi dan dilakukan dalam perjalanan kerja. Kejahatan ini termasuk pelanggaran tugas, kewajiban dan tanggung jawab dengan melakukan tindakan atau kelalaian yang tidak jelas atau nyata dalam penipuan yang disengaja, pencurian atau penyalahgunaan properti yang dipercayakan kepadanya.
2. Kecurangan karyawan, yaitu tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan yang merugikan entitas, meskipun manajemen telah melakukan tindakan pencegahan.
3. *Fraud* dari luar organisasi, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok, subkontraktor, dan lain-lain terkait dengan penyediaan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerima.

4. Kolaborasi yang tidak sehat dengan pihak luar atau orang dalam organisasi.

2.1.5 Fraud Triangle Theory

Fraud triangle adalah diagram yang menggambarkan motif-motif atau penyebab tindakan kecurangan. Donald R. Kersey (1953) mengungkapkan konsep *fraud* yang dikenal sebagai *fraud triangle*. Kersey mengatakan bahwa alasan seseorang dapat melakukan penipuan adalah:

1. Tekanan, melakukan kecurangan sangat bergantung pada keadaan individu, seperti masalah keuangan dan menghadapi kebiasaan buruk manusia seperti perjudian dan alkohol. Memiliki harapan / tujuan yang egois atau tidak realistis.
2. Kesempatan, menurut survei yang dilakukan oleh IIA Research Foundation pada tahun 1984, peluang dalam urutan yang paling umum: terlalu percaya diri pada anggota/bawahan. Manajemen prosedur otorisasi dan persetujuan yang buruk. Kurangnya informasi keuangan pribadi (kecurangan bank); tidak ada pemisahan antara pendelegasian kekuasaan dan perlindungan warisan. Tidak ada evaluasi kinerja independen. Kurangnya perhatian terhadap detail; tidak ada pemisahan antara pemegang aset dan fungsi manajemen arsip. Tidak ada pemisahan kewajiban akuntansi. Kurangnya kejelasan mengenai pemberian izin. Departemen/bagian jarang diaudit. Pernyataan bahwa tidak ada alasan untuk menimbulkan benturan kepentingan, dokumentasi dan catatan yang tidak memadai.

3. Pembeneran, terjadi ketika individu atau sekelompok orang membangun pembeneran atas kecurangan yang telah terjadi. Scammers sering menemukan alasan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah pencurian atau kecurangan.

2.1.6 Audit Investigatif

A. Pengertian Audit Investigatif

Audit investigatif dapat dengan mudah didefinisikan sebagai upaya untuk membuktikan atas suatu kesalahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa suatu audit sedang dilakukan dan merupakan audit umum atau keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan, untuk itu audit ini disebut juga opini audit. Audit investigasi dimaksudkan untuk membuktikan adanya kecurangan dan kegiatan ilegal lainnya.

Jack Bologna dan Paul Shaw yang dikutip dalam Tunggal (2012), menyatakan bahwa audit investigatif adalah keterampilan yang melampaui ranah penggelapan dan penipuan dalam manajemen perusahaan atau suap bisnis. Faktanya, keterampilan akuntansi forensik melampaui wilayah umum kejahatan berkerah.

Menurut Pusdiklat BPKP (2008), audit investigatif adalah kegiatan pendeteksian kecurangan yang sistematis dan terukur karena diketahui atau mengindikasikan suatu peristiwa/kejadian/transaksi yang memberikan keamanan yang cukup dan dapat digunakan sebagai bukti memenuhi pembuktian kebenaran. dalam menjelaskan peristiwa yang sebelumnya dianggap memperoleh keadilan. Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa audit investigasi ini berhubungan

dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan. Tiga elemen yang dapat membantu melengkapi informasi yaitu dimana *fraud* terjadi, kemampuan auditor untuk merekonstruksi jalannya peristiwa kecurangan, dan pengetahuan dari orang yang melihat atau mengetahui jalannya kecurangan.

Pelaksanaan audit investigatif bertujuan untuk menetapkan kebenaran suatu hal melalui proses pemeriksaan, pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang relevan dengan tindakan kecurangan dan pengungkapan fakta kecurangan tersebut, antara lain:

1. Adanya perbuatan *fraud* (subyek)
2. Mengidentifikasi pelaku *fraud* (obyek)
3. Menjelaskan modus operandi *fraud* (modus)
4. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.

Kualifikasi auditor Audit investigasi harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan audit investigasi. Auditor yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian harus meminta nasihat dari auditor lain yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam audit investigasi. Auditor investigasi juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang hal-hal yang akan diaudit, khususnya yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan proses bisnis yang berkaitan dengan kasus yang diaudit. Secara khusus, auditor yang akan melakukan audit investigasi harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diperiksa, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan pelanggaran seperti KUHAP atau KUHAP.

Kompetensi dan kemampuan merupakan hal yang paling mutlak harus dimiliki oleh seorang auditor. Apalagi jika Anda seorang penyidik. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), auditor/reviewer harus kompeten di bidang yang diauditnya. Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang sehubungan dengan ujian dan pertanyaan atau bidang tertentu. Keterampilan yang harus dimiliki auditor adalah pengetahuan dasar akuntansi, auditing, pengendalian internal dan investigasi. Auditor kemudian juga harus memiliki keterampilan teknis untuk memahami hukum dan undang-undang, merumuskan hipotesis dan mengumpulkan bukti. Dan terakhir, auditor investigatif harus memiliki sikap mental seperti independen dan mengikuti standar (Tuanacotta, 2010).

Audit investigatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigatif ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut (Dewi dan Ramantha, 2016). Sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor PER- 1314/K/D6/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa audit investigasi menjalankan suatu investigasi sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditentukan yang juga merupakan bagian dari substansi hukum yang mengatur

tentang apakah bukti yang ada cukup untuk membuktikan kejahatan kecurangan tersebut. Apabila auditor Investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian sebagai Auditor Investigatif, maka auditor tersebut telah mampu melaksanakan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan yang efektif.

B. Pendekatan Audit Investigatif

Menurut Fitrawansyah (2014:22) terdapat dua macam audit investigatif diantaranya yaitu:

1. Audit investigasi proaktif

Audit investigasi proaktif adalah audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko-risiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu, audit investigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti

untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

2. Audit investigasi reaktif

Audit investigasi reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang dapat/berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara. Istilah reaktif itu sendiri didasarkan pada fakta bahwa auditor melakukan reaksi untuk memvalidasi bukti-bukti indikasi penyimpangan tersebut. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan.

C. Standar Audit Investigatif

Sederhananya, standar adalah ukuran kualitas. Standar ini memungkinkan pihak yang diaudit (*auditee*), pihak yang menggunakan laporan audit, dan pihak lain untuk mengukur kualitas pekerjaan auditor. Seperti halnya akuntan, Standar

Profesi Akuntan Publik (SPAP) SPAP ini memuat standar audit, atestasi, dan pengendalian mutu. Namun, SPAP tidak mengatur secara khusus audit investigatif atau *fraud* audit. Standar dapat digambarkan secara sederhana sebagai ukuran mutu, oleh sebab itu dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut sehingga pihak-pihak terkait yang berkepentingan dapat menilai kinerja daripada auditor tersebut.

Menurut K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, ada beberapa standar audit investigatif dalam pemeriksaan *Fraud*, yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh investigasi harus dilakukan berdasarkan pada praktik-praktik audit yang diakui sesuai standar.
- b. Pengumpulan bukti, barang bukti dan alat bukti dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Memastikan seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan di indeks dan tersedianya jejak audit.
- d. Memastikan bahwa para investigator mengerti dan menghormati hak sesama, seperti asas praduga tak bersalah dan menghormati kebebasan seseorang.
- e. Beban pembuktian harus melampaui keraguan yang layak, seperti sedikitnya 2 alat bukti yang meyakinkan.
- f. Menguasai seluruh cakupan substansi investigasi dan targetnya sesuai waktu.
- g. Mendokumentasikan seluruh tahapan dalam proses investigasi atau pemeriksaan *Fraud*, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dan kontak dengan pihak ketiga, pengamanan

mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, mengikuti protokol dan sesuai prosedur, arsip dan penyelenggaraan pencatatan, melibatkan hukum, kewajiban hokum dan persyaratan pelaporan lainnya.

2.1.7 Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Kecurangan *Fraud*

Ciri penting dari audit investigatif dalam mengungkapkan *fraud* adalah kegiatan tersebut selalu ditandai dengan Kurangnya informasi aktual mengenai tindakan *fraud* beserta pelakunya. Berikut elemen-elemen yang dapat membantu para auditor investigatif dalam mengungkapkan *fraud* (Karyono, 2002):

- a. Tempat terjadinya *fraud*. Diketuinya tempat dimana tindakan *fraud* tersebut terjadi sangat berguna bagi investigator dalam memeriksa dan menginterpretasikan *fraud* tersebut. Sehingga kesimpulan dapat diambil dan direkonstruksikan jalannya *fraud* tersebut.
- b. Kemampuan auditor dalam merekonstruksikan terjadinya *fraud*. Pengetahuan sangat diperlukan bagi seorang investigator dalam menemukan kekurangan informasi. Seorang investigator yang berpengalaman cenderung dapat melihat indikasi adanya *fraud* sehingga dapat ditunjukkan jenis beserta motifnya.
- c. Informasi dari orang yang mengetahui *fraud*. Informasi ini sangat penting untuk menggali lebih banyak dan dalam akan kebenaran fakta yang ada.

Secara umum audit investigatif terdiri dari enam tahapan, yaitu:

1. Pra-perencanaan. Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan dan analisis data.

2. Perencanaan. Hipotesis akan dikembangkan atas suatu tindakan *fraud* dan dilakukan perencanaan audit.
3. Pengumpulan bukti. Dalam tahap ini bukti-bukti yang dianggap sebagai bukti hukum dalam mengungkapkan *fraud* akan dikumpulkan oleh auditor.
4. Evaluasi bukti. Bukti-bukti akan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara bukti yang ada dengan hipotesis yang dikembangkan.
5. Pelaporan bukti. Dilakukan penyusunan laporan audit investigatif sebagai bukti dokumentasi bahwa auditor telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Tindak lanjut. Dalam tahap ini hasil temuan audit investigatif dipastikan apakah telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut atau tidak.

2.1.8 Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menjelaskan : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian yang relevan berisi tentang data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fauzan, Purnamasari, dan Gunawan (2015)	Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik serta audit investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . Berdasarkan hasil analisis, hubungan yang kuat juga ditunjukkan kedua variabel bebas terhadap pengungkapan <i>fraud</i> 0.647(R), selain itu kemampuan yang ditunjukkan variabel-variabel

			independen dalam menjelaskan pengungkapan <i>fraud</i> sebesar 45,5% (R square= 0.455) sedangkan 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
2.	Sayyid (2014)	Pemeriksaan <i>Fraud</i> Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif	akuntansi forensik dan audit investigatif berperan signifikan dalam pemeriksaan kasus-kasus <i>fraud</i> (kecurangan). Selanjutnya dijelaskan bahwa akuntansi forensik dan audit investigatif berperan signifikan dalam pemeriksaan kasus-kasus <i>fraud</i> (kecurangan). Akuntansi forensik dan audit investigatif dapat memberikan pembuktian yang sah secara hukum dalam hal pemeriksaan kasus-kasud <i>fraud</i> .
3.	Enika Diana Batubara, SE,M.Si	Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Hasil penelitian Secara parsial akuntansi forensic berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Audit investigative tidak berpengaruh signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap mendeteksi kecurangan
4.	Padri Achyarsyah (2019)	Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)	Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan. Penerapan prinsip-prinsip dasar audit investigatif dan teknik-teknik audit investigatif dapat dilakukan secara baik, kompeten dan maksimal
5.	Recky Vincent	Analisis Penerapan	Berdasarkan hasil penelitian dan

	Oktaviano Wuysang Grace Nangoi Winston Pontoh	Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara	analisis pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atas penelitian ini, yaitu Penerapan Akuntansi forensik terhadap pendeteksian (detektif) <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan melakukan kegiatan (metode) pendeteksian melalui : a. Audit Operasional (<i>Operational Audit</i>) b. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Probity Audit</i>) c. Audit Computer Forensic (EDP Audit) d. Layanan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) Kegiatan-kegiatan tersebut adalah aplikatif dan berfungsi efektif dalam mendeteksi berbagai kecurangan (<i>fraud</i>) yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.
6.	Wahyuadi Pamungkas, Jaeni (2022)	Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)	Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, 1. Akuntansi Forensik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . 2. Audit Investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . 3. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . 3.Skeptisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> .
7.	Nasha Ihulhaq, Edi Sukarmanto, Pupung	Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap	Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian dalam

	Purnamasari	Pendeteksian <i>Fraud</i>	beberapa poin dibawah ini: 1. Akuntansi forensik terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> . 2. Audit investigasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
--	-------------	---------------------------	---

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti kembali pengaruh variabel bebas yaitu penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan menggunakan objek penelitian berbeda yaitu Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan auditor intern pemerintah. Sehingga, akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013).

2.3.1 Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka memperkecil kerugian akibat *fraud* serta memperbaiki sistem pengendalian Jika terdapat indikasi kuat terjadinya *fraud*, maka langkah yang tepat untuk melakukan audit investigasi dalam mendeteksi *fraud*. istilah Audit Investigatif timbul dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang investigasi Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “audit investigatif termasuk dalam pemeriksaan dengan

tujuan tertentu, yaitu investigasi yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar investigasi keuangan serta kinerja”.

Dengan melakukan penerapan audit investigatif dilengkapi dengan pengetahuan serta keterampilan audit investigatif, seperti strategi pengawasan, wawancara, serta keahlian interogasi, membantu akuntan forensik mempunyai keterampilan lain di luar keterampilan yang berkaitan dengan audit dan bisa memadukan menggunakan aspek keuangan serta hukum. Hasil Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Recky Vincent, et al., 2016) mengungkapkan bahwa penerapan audit investigatif terhadap penanganan (represif) *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berfungsi efektif dalam menangani kasus-kasus *fraud* yang terungkap dalam pengelolaan keuangan daerah,

Penelitian (Ardiansyah, et al., 2016) mengungkapkan bahwa Audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- 1. Penerapan Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud* dalam pengelolaan keuangan Daerah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. “Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian”. (Juliandi, Irfan & Manurung, 2015).

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

1. Penerapan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini dirancang untuk menguji teori dan untuk meneliti Pengaruh Penerapan Audit Investigatif terhadap pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey, yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden.

Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis yang meneliti beberapa populasi atau sampel, menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data, dan melakukan analisis data statistik untuk menguji hipotesis yang ada. Metode penelitian ini disebut kuantitatif karena data digunakan dalam bentuk numerik dan dianalisis menggunakan statistik. (Sugiba Ye, 2014:11)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, solusi dan masukan terhadap sumber-sumber *fraud*, serta metode pengungkapan *fraud* yang efektif di sektor swasta dan pemerintah. Penerapan sumber data (narasumber/informan/partisipan) dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) adalah atribut atau sifat atau nilai obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audit Investigatif (X_1).

3.2.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel bebas. Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengungkapan *fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah(Y).

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala
Audit Investigatif (X_1)	Audit investigasi adalah audit dengan tujuan membuktikan dugaan penyimpangan sesuai prosedur dan teknik-teknik audit investigasi dalam bentuk kecurangan (<i>fraud</i>), ketidak teraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi. 2. Background ilmu Akuntansi dan Auditing. 3. Pengetahuan investigasi dan <i>fraud</i>, Teknik audit investigasi dan cara memperoleh bukti. 4. Pengetahuan bukti 	Likert

	(<i>irregulities</i>), pengeluaran illegal (<i>illegal expenditure</i>) atau penyalahgunaan wewenang (<i>abuse of power</i>) (Fauzan, eat all 2014)	relevan dan kompeten. 5. Prosedur audit 6. Menjaga kerahasiaan sumber informasi. 7. Mematuhi peraturan	
Pengungkapan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Tindakan ketika <i>fraud</i> sudah terjadi, Meminimalisir kecurangan merupakan tanggungjawab manajemen. Auditor bertugas menguji dan menganalisis efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seorang auditor pada saat melakukan audit harus sesuai dengan prosedur, menganalisis gejala-gejala kecurangan (<i>fraud</i>), melakukan penelusuran untuk mengungkap kecurangan (<i>fraud</i>) dan mengidentifikasi semua kecurangan yang mungkin terjadi (Nurmin, 2017)	1. Mencari kebenaran 2. Pengumpulan bukti 3. Pengumpulan fakta-fakta 4. Proses pengungkapan <i>fraud</i> tertulis dan baku.	Likert

Saat mengukur variabel, peneliti menggunakan skala Likert sebagai alat untuk mengukur variabel yang menjadi subjek penelitian. Skala likert merupakan pertanyaan yang menunjukkan sejauh mana responden setuju atau tidak setuju (Sujarweni, 2015). Menurut Sugiyono (2016), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara khusus oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala likert digunakan untuk menyatakan sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan berbagai pertanyaan tentang perilaku, objek, orang, atau peristiwa.

Biasanya skala yang disarankan terdiri dari 5 atau 7 poin. Skala Likert 5 poin digunakan dalam penelitian ini (Ferdinand, 2006).

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto, KM. 5,5 Medan 20122. Alasan dipilihnya BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi lokasi penelitian adalah karena merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan audit investigatif terhadap keuangan dan pembangunan daerah.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022, Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skedul Rencana Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul		■														
2.	Riset Awal			■													
3.	Pembuatan Proposal				■	■	■	■	■								
4.	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal								■								
6.	Riset									■	■	■	■				
7.	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■

8.	Bimbingan Skripsi																		
9.	Sidang Meja Hijau																		

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, data digolongkan atas data numerik (kuantitatif), dan data kategorik (kualitatif).

1. Jenis data numerik (kuantitatif), merupakan data yang dinyatakan dalam besaran numerik/angka.
2. Jenis data kategorik (kualitatif), merupakan data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.

Berdasarkan sumbernya, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer, merupakan sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan sendiri yakni diperoleh langsung peneliti dari informan/partisipan. Dalam hal ini yaitu jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.
2. Sumber data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari pihak lain (penyedia data).

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi Penelitian

Menurut Silaen (2018: 87) “Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut *universum (universe)* yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati”.

Dilihat dari pendapat di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang terdaftar dan bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 143 orang.

3.5.2 Sampel Penelitian

Menurut Silaen (2018: 87) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

1. Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang pernah melaksanakan audit investigatif.
2. Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki pengalaman di bidang audit investigatif minimal 1 tahun.

Dari kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Kuesioner

Berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun secara terstruktur dan mengacu pada variabel penelitian yang akan responden jawab, dimana tujuannya untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang akan diteliti, yakni audit forensik, audit investigatif, pencegahan dan pengungkapan *fraud* dengan cara menyebarkan langsung kepada sampel.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 skala likert dengan memberi skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan perincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan pada auditor internal BPKP Provinsi Sumatera Utara yang pernah melakukan audit investigatif minimal 1 tahun.

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kemahiran suatu instrumen pertanyaan sebagai alat ukur variabel penelitian

(Juliandi et al., 2015). Berikut rumus menguji validitas adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy}	= Item Instrumen variabel dengan totalnya
x	= Jumlah butir pertanyaan
y	= Skor total pertanyaan
n	= Jumlah sampel

Dengan kriteria :

- Jika sig 2 tailed $< \alpha$ 0,05, maka butir instrumen tersebut valid.
- Jika sig 2 tailed $> \alpha$ 0,05, maka butir instrumen tidak valid dan harus dihilangkan.

Dalam Juliandi & Dkk (2015, hal. 77) jika korelasi (r) yang diperoleh positif. Kemungkinan butir yang di uji tersebut adalah valid. Namun walaupun positif perlu pula nilai korelasi (r) yang dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Caranya adalah membandingkan nilai korelasi yakni r hitung dengan r table. Apabila nilai r hitung $> r$ table, maka butir instrumen tersebut adalah signifikan dan jika nilai probabilitas sig $< \alpha$ 0,05 maka suatu item instrumen yang di uji korelasinya adalah valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 20 auditor sebagai percobaan uji kualitas data. Kemudian untuk Rtable 20 responden yaitu sebesar 0,444.

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Penerapan Audit Investigatif

Tekanan Waktu			
Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Hasil Uji
Item 1	0,845	0,444	Valid
Item 2	0,760	0,444	Valid
Item 3	0,596	0,444	Valid
Item 4	0,871	0,444	Valid
Item 5	0,633	0,444	Valid
Item 6	0,832	0,444	Valid
Item 7	0,905	0,444	Valid
Item 8	0,896	0,444	Valid
Item 9	0,808	0,444	Valid
Item 10	0,871	0,444	Valid
Item 11	0,768	0,444	Valid
Item 12	0,488	0,444	Valid
Item 13	0,565	0,444	Valid
Item 14	0,759	0,444	Valid

Sumber : Output SPSS yang Diolah Penulis, 2022

Tabel di atas diketahui bahwa dari 14 item pernyataan variabel penerapan audit investigatif, semua dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari 14 item pernyataan tersebut dikatakan valid sehingga semua item valid dapat diikuti sertakan untuk menjelaskan variabel penerapan audit investigatif

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tekanan Waktu			
Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Hasil Uji
Item 1	0,678	0,444	Valid
Item 2	0,693	0,444	Valid
Item 3	0,681	0,444	Valid
Item 4	0,918	0,444	Valid
Item 5	0,821	0,444	Valid
Item 6	0,693	0,444	Valid

Item 7	0,532	0,444	Valid
Item 8	0,9`8	0,444	Valid
Item 9	0,650	0,444	Valid
Item 10	0,543	0,444	Valid

Sumber : Output SPSS yang Diolah Penulis, 2022

Tabel di atas diketahui bahwa dari 10 item pernyataan variabel pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah, semua dinyatakan valid dengan nilai r hitung $>$ r tabel. Dari 10 item pernyataan tersebut dikatakan valid sehingga semua item valid dapat diikuti sertakan untuk menjelaskan variabel pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah

2) Uji Reabilitas

Menurut (A Juliandi et al., 2015) tujuan pengujian reabilitas untuk menilai apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang Handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang Handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Uji reabilitas dilakukan setelah uji validitas atas pernyataan yang telah valid. Pengujian reabilitas dapat menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan rumus :

$$r = \left[\frac{k}{(k - 1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Keterangan :

r = Realibilitas instrument (*cronbach alpha*)

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Varians butir

$$\sigma_i^2 = \text{Varians Total}$$

Dengan Kriteria :

Nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) > 0,6 maka kesimpulannya instrument yang diuji tersebut adalah real (terpercaya) (Juliandi, 2015).

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Audit Investigatif	0,943 > 0,6	Reliabel
Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	0,861 > 0,6	Reliabel

Sumber : Output SPSS yang Diolah Penulis, 2022

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner ini reliabel karena mempunyai nilai Cornbach's Alpha > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan, menguraikan ke dalam satuan-satuan, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk

analisis yang dirancang untuk bekerja dengan data besar yang dikelompokkan secara numerik ke dalam kategori.

3.7.1 Uji *Partial Least Square*

Penelitian ini menggunakan analisis regresi partial (Partial Least Square/PLS) untuk menguji tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variabel. Alasan menggunakan PLS-SEM pada penelitian ini adalah jumlah sampel pada penelitian ini tergolong sedikit yaitu 32 responden (Pertiwi & Sharif, 2019). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SEM dengan PLS yaitu suatu teknik alternatif pada analisis SEM di mana data yang dipergunakan tidak harus berdistribusi normal multivariat. PLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi (Wold,1985). Variabel dalam penelitian ini bersifat laten karena memerlukan indikator atau pernyataan-pernyataan untuk menjelaskannya serta sampelnya yang tidak terlalu besar sehingga alat analisis yang cocok adalah dengan menggunakan PLS.

Menurut Imam Ghozali (2006:4) PLS adalah salah satu metode yang dapat menjawab masalah pengukuran indeks kepuasan karena PLS tidak memerlukan asumsi yang ketat, baik mengenai sebaran dari perubahan pengamatan maupun ukuran contoh yang tidak besar. Jogiyanto, (2007) juga menyatakan bahwa analisis Partial Least Squares (PLS) merupakan teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis

varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data. Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap :

1. Analisa *Outer Model* (Model Pengukuran)
2. Analisa *Inner Model* (Model Struktural)
3. Pengujian *Hipotesis*

3.7.2 Analisa *Outer Model* (Model Pengukuran)

Menurut Hussein (2015 : 18) analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini :

- a. *Convergent validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.
- b. *Discriminant validity* adalah nilai *crossloading* faktor yang berguna apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Caranya dengan membandingkan nilai konstruk yang dituju harus lebih besar dengan nilai konstruk yang lain.
- c. *Composite reliability* adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas $> 0,7$ maka nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.

- d. *Average Variance Extracted* (AVE) adalah rata-rata varian yang setidaknya sebesar 0,5.
- e. *Cronbach alpha* adalah perhitungan untuk membuktikan hasil *composite reliability* dimana besaran minimalnya adalah 0,6.

3.7.3 Analisa Inner Model

Pada analisa model ini adalah untuk menguji hubungan antara konstruksi laten. Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini :

- a. *R Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998) dalam Sarwono (2015 : 30) menjelaskan “kriteria batasan nilai *R square* ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 sebagai substantial; 0,33 sebagai moderat dan 0,19 sebagai lemah”.
- b. *Effect size (F square)* untuk mengetahui kebaikan model. Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2015 : 80) interpretasi nilai *f square* yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level struktural.
- c. *Prediction relevance (Q square)* atau dikenal dengan *Stone-Geisser's*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya hasil penelitian akan di uji dengan uji *T-test* dengan menggunakan metode *bootstrapping*. Tujuannya adalah memungkinkan

berlakunya data terdistribusi bebas, tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan tidak membutuhkan sampel yang besar (minimum 30 sampel). Prosedur bootstrapping menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel. Penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan (α) = 5% = 0,05. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1.96), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1.96), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali dan Latan, 2015). SmartPLS juga menghasilkan nilai koefisien untuk setiap indikator. Dengan demikian bisa dilihat indikator mana yang memberikan pengaruh terbesar dan mana yang pengaruhnya paling kecil. Pembaca dapat menggunakan hasil ini untuk memberikan saran bagi praktisi yang terkait dengan penelitian pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data Umum

4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif yang merupakan gambaran dari keadaan atau kondisi responden yang perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Data ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden/auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Kuesioner yang dikembalikan kepada penulis dan telah diisi oleh responden, selanjutnya akan diteliti kelengkapannya. Dari responden tersebut, kuesioner yang telah disebar adalah sebanyak 32 kuesioner. Sehingga diperoleh sampel dari populasi penelitian ini adalah sebanyak 32 responden. Sesuai dengan cara penarikan sampel dengan menggunakan rumus *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 14 pernyataan untuk variabel X yaitu penerapan audit investigatif dan 10 pernyataan untuk variabel Y yaitu pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert yang terdapat pada tabel 4.1 dalam bentuk check list pada kuesioner.

Tabel 4.1
Skala Pengukuran Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Setiap responden yang menjawab kuesioner yang dibagikan oleh penulis, maka bobot atau nilainya dari yang tertinggi yaitu 5 point hingga nilai yang terendah, yaitu 1 point.

4.1.2 Deskriptif Karakteristik Responden

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian ini, maka penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai gambaran umum dari responden yang mengisi kuisisioner. Hal ini dilakukan penulis agar menghindari terjadinya bias bagi penelitian ini, sehingga penelitian dapat memberikan regenerasi yang baik. Responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan masa bekerja. Data karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	19	59.38	59.38	59.38
	Wanita	13	40.62	40.62	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden pria lebih mendominasi proporsi sampel auditor BPKP Perwakilan Sumatera Utara, yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 59,38% dan responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 40,62%.

2. Karakteristik Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4.3
Jenjang Pendidikan Responden
Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	0	0.00	00.0	00.0
	S1	23	71.88	71.88	71.88
	> S1	9	28.12	28.12	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 23 responden atau 71,88%. Responden yang memiliki pendidikan diatas Strata Satu (S1) berjumlah 9 orang atau 28,12% dan Diploma sebesar 0,0 % atau tidak ada.

3. Karakteristik Berdasarkan Masa Bekerja

Tabel 4.4
Masa Bekerja Responden
Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 3 Tahun	5	15.63	15.63	15.63
	4 – 5 Tahun	12	37.5	37.5	53.13
	> 5 tahun	15	46.87	46.87	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebesar 46,87% atau sekitar 15 orang yang memiliki masa bekerja lebih dari 5

tahun. 37,5% atau sekitar 12 orang memiliki masa bekerja dari 4 sampai 5 tahun dan sisanya 15,63% atau sekitar 5 auditor memiliki masa bekerja kurang dari 3 tahun.

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.3.1 Variabel Penerapan Audit Investigatif

Tabel 4.5
Deskripsi Variabel Penerapan Audit Investigatif

Pernyataan Yang Berhubungan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi dengan baik.	0	0	0	0	0	0	8	25	24	75	32	100
2. Auditor investigatif menyampaikan laporannya kepada otoritas yang tinggi dari orang yang diduga melakukan fraud.	0	0	0	0	0	0	9	28,1	23	71,9	32	100
3. Auditor Investigatif menerapkan ilmu auditing dalam melakukan audit investigatif	0	0	0	0	0	0	5	15,6	27	84,4	32	100
4. Auditor investigatif melakukan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP)	0	0	0	0	0	0	7	21,9	25	78,1	32	100
5. Auditor investigatif mengetahui tentang hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan kasus yang ditangani	0	0	0	0	0	0	13	40,6	19	59,4	32	100
6. Auditor investigatif memahami karakteristik-karakteristik kecurangan yang melekat pada setiap tindak kecurangan secara baik	0	0	0	0	0	0	8	25	24	75	32	100
7. Auditor investigatif memperhatikan teknik-	0	0	0	0	0	0	7	21,9	25	78,1	32	100

teknik audit investigasi dalam memperoleh bukti.													
8. Setelah melakukan audit investigasi, Auditor investigatif memperoleh hipotesis pada suatu tahap penyidikan.	0	0	0	0	0	0	6	18,8	26	81,3	32	100	
9. Auditor investigatif melakukan evaluasi suatu bukti.	0	0	0	0	0	0	8	25	24	75	32	100	
10. Auditor investigatif selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari bukti audit yang perolehnya	0	0	0	0	0	0	9	28,1	23	71,9	32	100	
11. Auditor investigatif merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang telah di peroleh	0	0	0	0	0	0	8	25	24	75	32	100	
12. Auditor investigatif harus dapat diandalkan dan dipercaya.	0	0	0	0	0	0	5	15,6	27	84,4	32	100	
13. Pada saat investigasi, Auditor investigatif memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapat.	0	0	0	0	0	0	5	15,6	27	84,4	32	100	
14. Auditor investigatif harus tetap bersifat independen dalam melakukan audit walaupun auditee merupakan kenalan baiknya.	0	0	0	0	0	0	6	18,8	26	81,3	32	100	

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi dengan baik.” sebanyak 24 orang atau 75%.

2. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif menyampaikan laporannya kepada otoritas yang tinggi dari orang yang diduga melakukan fraud” sebanyak 23 orang atau 71,9%.
3. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor Investigatif menerapkan ilmu auditing dalam melakukan audit investigatif.” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
4. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif melakukan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP)” sebanyak 25 orang atau 78,1%.
5. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif mengetahui tentang hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan kasus yang ditangani” sebanyak 19 orang atau 59,4%.
6. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif memahami karakteristik-karakteristik kecurangan yang melekat pada setiap tindak kecurangan secara baik” sebanyak 24 orang atau 75%.
7. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif memperhatikan teknik-teknik audit investigasi dalam memperoleh bukti.” sebanyak 25 orang atau 78,1%.
8. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Setelah melakukan audit investigasi, Auditor investigatif memperoleh hipotesis pada suatu tahap penyidikan.” sebanyak 26 orang atau 81,3%.
9. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif melakukan evaluasi suatu bukti.” sebanyak 24 orang atau 75%.

10. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari bukti audit yang perolehnya” sebanyak 23 orang atau 71,9%.
11. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang telah di peroleh” sebanyak 24 orang atau 75%.
12. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif harus dapat diandalkan dan dipercaya.” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
13. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Pada saat investigasi, Auditor investigatif memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapat” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
14. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif harus tetap bersifat independen dalam melakukan audit walaupun auditee merupakan kenalan baiknya. ” sebanyak 26 orang atau 81,3%.

4.1.3.2 Deskripsi Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pernyataan Yang Berhubungan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Investigasi merupakan tindakan mencari kebenaran	0	0	0	0	1	3,1	3	9,4	28	87,5	32	100
2. Apabila auditor investigatif curiga bahwa mungkin ada kecurangan, standar	0	0	0	0	0	0	5	15,6	27	84,4	32	100

auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material													
3. Auditor investigatif melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti audit.	0	0	0	0	0	0	7	21,9	25	78,1	32	100	
4. Auditor investigatif harus memahami bahwa benda-benda fisik yang terkait dengan tindak kejahatan mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sangat berarti	0	0	0	0	0	0	5	15,6	27	84,4	32	100	
5. Auditor investigatif memeriksa dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian disimpan secara elektronik	0	0	0	0	0	0	4	12,5	28	87,5	32	100	
6. Auditor investigatif akan melakukan observasi untuk pengujian fisik	0	0	0	0	0	0	6	18,8	26	81,3	32	100	
7. Auditor investigatif meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada auditee.	0	0	0	0	2	6,3	4	12,5	26	81,3	32	100	
8. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber - sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan	0	0	0	0	0	0	3	9,4	29	90,6	32	100	
9. Auditor investigatif harus menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif	0	0	0	0	1	3,1	3	9,4	28	87,5	32	100	
10. Semakin kecil waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon, maka kemungkinan bahwa suatu tindakan kejahatan dapat terungkap akan semakin benar	0	0	0	0	1	3,1	3	9,4	28	87,5	32	100	

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Investigasi merupakan tindakan mencari kebenaran” sebanyak 28 orang atau 87,5%.
2. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Apabila auditor investigatif curiga bahwa mungkin ada kecurangan, standar auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
3. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti audit.” sebanyak 25 orang atau 78,1%.
4. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif harus memahami bahwa benda-benda fisik yang terkait dengan tindak kejahatan mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sangat berarti.” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
5. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif memeriksa dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian disimpan secara elektronik.” sebanyak 28 orang atau 87,5%.
6. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif akan melakukan observasi untuk pengujian fisik” sebanyak 26 orang atau 81,3%.
7. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada auditee” sebanyak 26 orang atau 81,3%.

8. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber - sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan” sebanyak 29 orang atau 90,6%.
9. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Auditor investigatif harus menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif” sebanyak 27 orang atau 84,4%.
10. Mayoritas responden sangat setuju pada pernyataan “Semakin kecil waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon, maka kemungkinan bahwa suatu tindakan kejahatan dapat terungkap akan semakin benar” sebanyak 28 orang atau 87,5%.

4.1.4 Analisis Outer Model

4.1.4.1 Validity Item

Average Variance Extracted (AVE) menggambarkan besaran variance yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan dengan varian yang disebabkan oleh error pengukuran. Standarnya adalah bila nilai AVE diatas 0,5 maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki convergent validity yang baik. Artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah variance dari indikator-indikatornya

Tabel 4.7
Hasil AVE (*Average Variant Extracted*)

Variabel / Konstruk	AVE	Hasil Uji
Penerapan Audit Investigatif (X)	0.537	Valid
Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.563	Valid

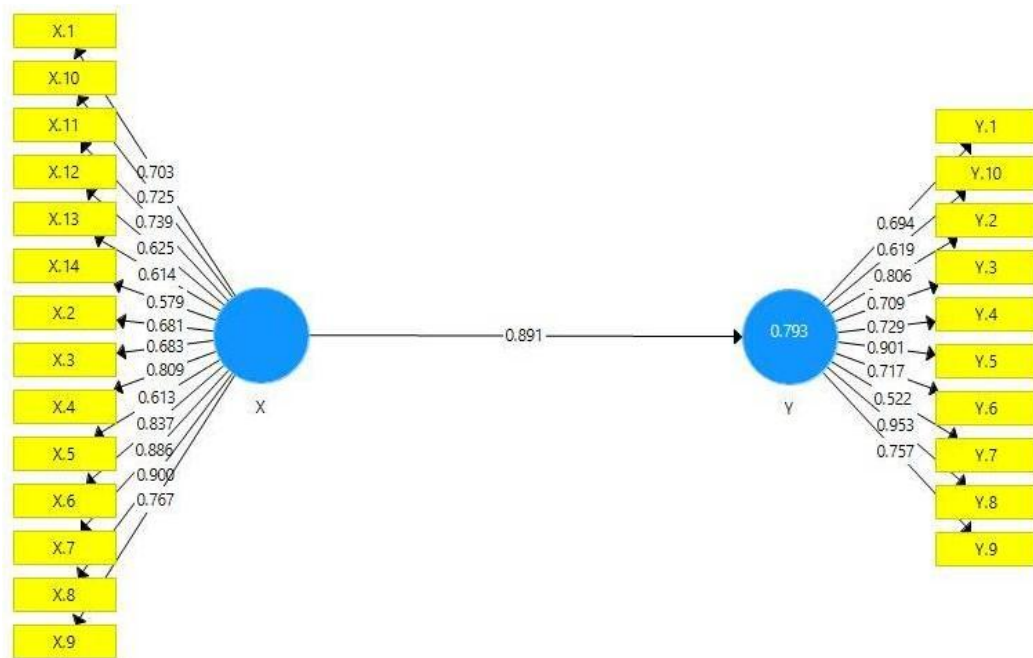
Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai AVE untuk penerapan audit investigatif sebesar 0,537 dan nilai AVE pengungkapan fraud

dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,563. Kedua variabel memiliki AVE yang berada diatas 0,5 sehingga konstruk memiliki convergent validity yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

4.1.4.2 Convergen Validity

Untuk menguji *Convergen Validity* digunakan nilai Outer Loading atau loading faktor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergen validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading $> 0,5$. Berikut adalah hasil pengujian nilai outer loading masing-masing indikator pada variabel penelitian dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4.1
Standardized Loading Factor Inner dan Outer Model

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh loading bernilai lebih dari 0,5 sehingga tidak perlu disisihkan. Dengan demikian, tiap indikator telah valid untuk menjelaskan masing-masing laten variabelnya yaitu penerapan audit investigatif sebagai variabel independen dan pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen

4.1.4.3 *Composite Reliability*

Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu cronbach's alpha dan composite reliability. Cronbach's alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb yang digunakan untuk nilai composite reliability lebih besar dari 0,6 serta nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil uji reabilitas kedua metode dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

Variabel / Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil Uji
Penerapan Audit Investigatif (X)	0.931	0.941	Reliabel
Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.909	0.926	Reliabel

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha untuk penerapan penerapan audit investigatif sebesar 0.931 dan pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,909. Kedua variabel

memperoleh nilai cronbach's alpha diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan seluruh faktor memiliki reabilitas atau keterandalan yang baik sebagai alat ukur.

4.1.5 Analisis Inner Model

R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen) ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Hasil r-square untuk variabel laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2018). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Square yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut

Tabel 4.9
Nilai R-Square

Variabel	R-Square
Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.891

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022

Dari tabel 4.12 di atas diketahui bahwa pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah dengan nilai r-square 0,891 mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X sebesar 89,1% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan sisa nya 10,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

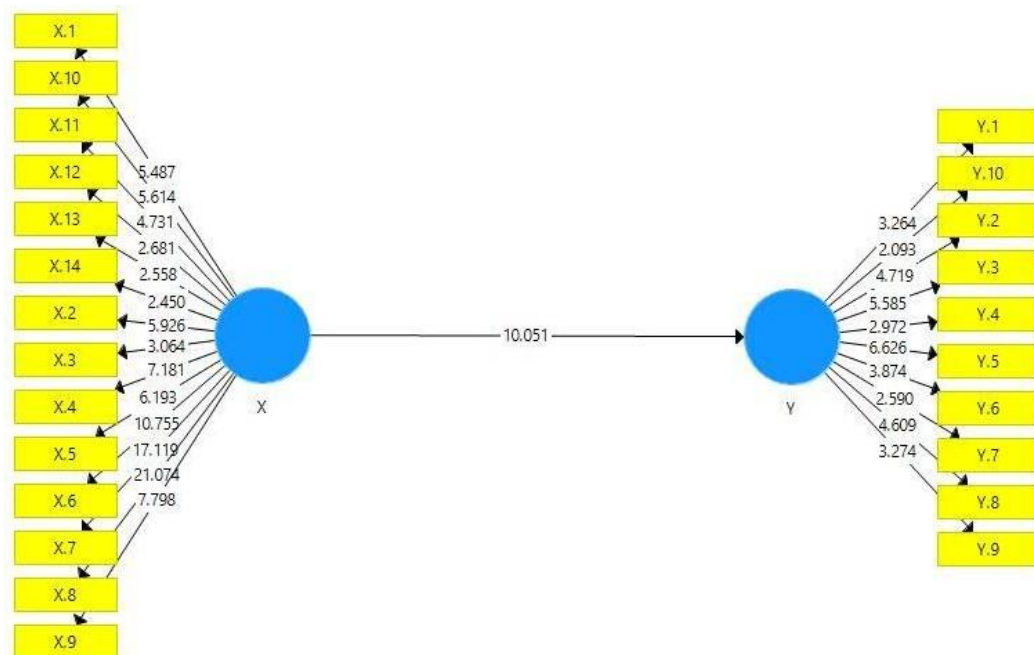
4.1.6 Pengujian Uji Hipotesis

Pengujian ini tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, gambar hasil uji hipotesis pengaruh dapat dilihat pada gambar path coefficient berikut ini:

Tabel 4.10
Nilai t-Statistics

Eksogen	-->	Endogen	Path Analysis	T Statistik	Values	Kesimpulan
Penerapan Audit Investigatif (X)	-->	Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.891	10.051	0.000	Diterima

Sumber : Output Data yang Diolah Penulis, 2022



Gambar 4.2
Path Coefficient

Pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai koefisien sebesar 0,891. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik penerapan audit investigatif maka semakin tinggi pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti penerapan audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah, pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* adalah 10,051 lebih besar dari *t* tabel 2,040 dan nilai *p-values* penerapan audit investigatif sebesar $0,000 < 0,05$ artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa hipotesis dapat diterima yaitu penerapan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah mempunyai koefisien sebesar 0,891. Ini menunjukkan bahwa jika semakin baik penerapan audit investigatif maka semakin tinggi pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini penerapan audit investigatif diukur dengan tujuh indikator yaitu komunikasi, background ilmu akuntansi dan auditing, pengetahuan investigasi dan fraud, prosedur audit, bukti relevan dan kompeten,

menjaga kerahasiaan sumber informasi dan mematuhi peraturan. Berdasarkan hasil outer loading masing-masing indikator diketahui bahwa outer loading indikator prosedur audit menghasilkan nilai tertinggi yaitu sebesar 0.900. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya selalu menjalankan prosedur audit dengan baik maka pengungkapan fraud dalam memeriksa pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik.

Dimana terdapat beberapa indikator dari audit investigatif, yang pertama yaitu komunikasi. komunikasi adalah proses pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi kepada seluruh personel perusahaan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya. komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Dengan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecenderungan terjadinya fraud.

Dalam audit investigatif akan dilakukan pengumpulan berbagai bukti secara sistematis untuk mengungkapkan ada tidaknya indikasi kecurangan sehingga dapat diambil tindak hukum selanjutnya. Hal ini membuat pelaksanaan audit investigasi menjadi lebih sulit dibandingkan pelaksanaan general audit, dimana auditor selain memahami ilmu akuntansi dan audit, juga harus memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang auditor yang menerapkan ilmu audit investigasi akan semakin lebih mudah dalam melakukan pengungkapan fraud. auditor kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara memiliki kemampuan dalam menerapkan prosedur audit dan teknik-teknik audit yang sangat baik dalam melakukan pengungkapan fraud.

Jika auditor dapat menerapkan teknik-teknik audit investigatif dengan baik dan tepat, maka proses pengungkapan fraud yang dilakukan akan semakin cepat dan pelaksanaan audit akan berjalan dengan lancar. Selain memiliki kemampuan di bidang audit investigatif, BPKP Provinsi Sumatera Utara juga harus memperhatikan faktor lain yang dapat mendukung pengungkapan fraud diantaranya adalah kompetensi auditor.

Auditor diharapkan telah memiliki kompetensi yang memadai terutama di bidang audit dan akuntansi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor tidak terlepas dari pengalaman dan keterampilan auditor dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena kompetensi auditor berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan auditor dalam melakukan pekerjaannya, maka semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor, semakin mudah auditor tersebut dalam mengungkap ataupun mendeteksi kasus fraud yang terjadi secara cermat, seksama, dan objektif.

Keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk itu setiap instansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi peraturan daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud dimana audit investigatif dilakukan sebagai tindakan regresif untuk menangani fraud yang terjadi dalam

pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan audit investigatif ditujukan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian buktibukti yang relevan dengan perbuatan fraud dan untuk mengungkapkan fakta-fakta fraud yang mencakup adanya perbuatan fraud (subyek), mengidentifikasi pelaku fraud (obyek), menjelaskan modus fraud (modus), dan menkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya (Wuysang dkk, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani dkk (2014) yang menyatakan bahwa teknik audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mulyati dkk (2015) yang dalam penelitian ini menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan audit investigatif berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti penerapan audit investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Penelitian ini juga masih memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan baik dalam segi hasil maupun dalam prosesnya. Dengan keterbatasan ini, di harapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan dan diberikan oleh peneliti adalah

1. Disarankan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan auditor terjait, agar kuesioner yang ada terjawab dengan jelas dan tidak ada kesalahpahaman.
2. Disarankan untuk menambah variabel independen untuk lebih memperjelas variabel pengungkapan fraud.
3. Disarankan untuk menambah jumlah responden serta menambah lingkup wilayah auditor agar hasil penelitian bisa dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2018). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Manajemen/Akuntansi*, 5(2), 1–27.
- ACFE Indonesia. (2020). Survei *Fraud* Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsah. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, dan GCG Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 52–68.
- Apandi, R. N. N., & Pradista, Y. (2014). Penggunaan Akuntansi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 314–325.
- Astuty, W. (2008). Dampak Kualitas Jasa Audit Terhadap Nilai Yang Diterima Klien. Dosen Fak. Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bologna, J. G., & Lindquist, R. J. (1987). *Fraud auditing and forensic accounting*. New York: Willey
- Dewi, N. W. P., & Ramantha, I. W. (2016). Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.2.*, 15(2), 1029–1055.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (*Fraud*). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2014). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud*. *Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 456–465
- Febriana, R., Hasan, A., & Andres. (2019). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Kemampuan Auditor Investigatif dalam Pengungkapan Penipuan dengan Profesionalisme sebagai Moderator pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 57–67.
- Harahap, R. U., & Putri, S. A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Kode Etik Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian *Fraud* Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Liabilities (Jurnal Pendidikan*

Akuntansi, 1(3), 251–262. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2554>

- Harvarindo. (2012). *Pengantar Forensik Auditing*. Jakarta: CPA MBA
- Hussein, A.S. 2015. *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Ihulhaq, N., Sukarmanto, E., & Purnamasari, P. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pendeteksian *Fraud*. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 309–317.
- Ismanda, R. M., Sukarmanto, E., & Hernawati, N. (2021). Pengaruh Audit Investigasi, Akuntan Forensik dan Pengalaman Auditor terhadap Pengungkapan *Fraud*. *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 7(1), 344–349.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *6-6-1-PB.pdf*.
- Karyono, K. (2002). *Fraud Auditing. The Winners*, 3(2), 150. <https://doi.org/10.21512/tw.v3i2.3847>
- Lestari, I. P., Widayanti, & Sukanto, E. (2019). Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan. *Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah*, 2, 558–563.
- Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Pamungkas, W. (2022). *Pengaruh Akuntansi Forensik , Audit Investigatif , Independensi , dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)*. 15(1), 99–109
- Sari, M. (2015). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Prosiding Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 60, 569–577.
- Satria, B. (2020). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Kantor Akuntan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta*. 2507(1), 1–9.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan *Fraud* Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>

- Shodiq Anita Carolina Yudhanta Sambharakhresna, N. (2013). Persepsi Auditor Terhadap Penerapan Audit Forensik Dalam Mendeteksi Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan. *JAFFA Oktober, 01(2)*, 113–128.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet ke-19, 2014, Hlm. 3
- Suhartono, S., & Jannah, R. (2021). Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 7(2)*, 1–15. <https://doi.org/10.35906/ja001.v7i2.735>
- Sulistiani, I., & Lhaksmi, O. (2021). Peran PENTING Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Upaya Pencegahan dan Pengungkapan *Fraud*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 24(2)*, 112–126. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi
- Syafitri, E., Aghnia, S., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh Audit Forensik Terhadap *Fraud* yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, 16(1)*, 85–92
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2)*, 115. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 7(2)*
- Yuliawan, K. (2021). Pelatihan SmartPLS 3.0 Untuk Pengujian Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1)*, 43–50.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

(Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Responden yang terhormat, Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Diajeng Frastika mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Oleh karena karna itu saya bermaksud melakukan penelitian pada instansi tempat Bapak/Ibu/Saudara(i) bekerja.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) menjawab dengan leluasa dan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya.

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Semoga penelitian ini dapat berkontribusi positif bagi saya dan kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan bantuannya. Wassalamu Wr. Wb.

Nama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Masa Bekerja :

Variabel Audit investigatif

Komunikasi

1. Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi dengan baik.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

2. Auditor investigatif menyampaikan laporannya kepada otoritas yang tinggi dari orang yang diduga melakukan fraud.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju

- Ragu-ragu
- Setuju
- Sangat Setuju

Background ilmu akuntansi dan auditing

3. Auditor Investigatif menerapkan ilmu auditing dalam melakukan audit investigatif.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

4. Auditor investigatif melakukan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP).
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Pengetahuan investigasi dan fraud

5. Auditor investigatif mengetahui tentang hukum (undang-undang) yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

6. Auditor investigatif memahami karakteristik-karakteristik kecurangan yang melekat pada setiap tindak kecurangan secara baik
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Prosedur audit

7. Auditor investigatif memperhatikan teknik-teknik audit investigasi dalam memperoleh bukti.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

8. Setelah melakukan audit investigasi, Auditor investigatif memperoleh hipotesis pada suatu tahap penyidikan.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Bukti relevan dan kompeten

9. Auditor investigatif melakukan evaluasi suatu bukti.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju
10. Auditor investigatif selalu mempertanyakan (questioning mind) terhadap validitas dari bukti audit yang perolehnya.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Menjaga kerahasiaan sumber informasi

11. Auditor investigatif merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang telah di peroleh
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju
12. Auditor investigatif harus dapat diandalkan dan dipercaya.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Mematuhi peraturan

13. Pada saat investigasi, Auditor investigatif memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapat.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju

- Sangat Setuju
14. Auditor investigatif harus tetap bersifat independen dalam melakukan audit walaupun auditee merupakan kenalan baiknya.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Variabel Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencari kebenaran

1. Investigasi merupakan tindakan mencari kebenaran
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

2. Apabila auditor investigatif curiga bahwa mungkin ada kecurangan, standar auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Pengumpulan bukti

3. Auditor investigatif melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti audit.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

4. Auditor investigatif harus memahami bahwa benda-benda fisik yang terkait dengan tindak kejahatan mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sangat berarti
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Proses pengungkapan fraud tertulis dan baku

5. Auditor investigatif memeriksa dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian disimpan secara elektronik
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

6. Auditor investigatif akan melakukan observasi untuk pengujian fisik
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

7. Auditor investigatif meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada auditee.
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Pengumpulan fakta-fakta

8. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber - sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

9. Auditor investigatif harus menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

10. Semakin kecil waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon, maka kemungkinan bahwa suatu tindakan kejahatan dapat terungkap akan semakin benar
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Ragu-ragu
 - Setuju
 - Sangat Setuju

2. Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Responden	Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)										Total Skor (Y)
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	47
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	5	46
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	48
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
15	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	48
19	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
30	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49

Uji Reabilitas Penerepan Audit Investigatif

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.943	14

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Uji Reabilitas Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics

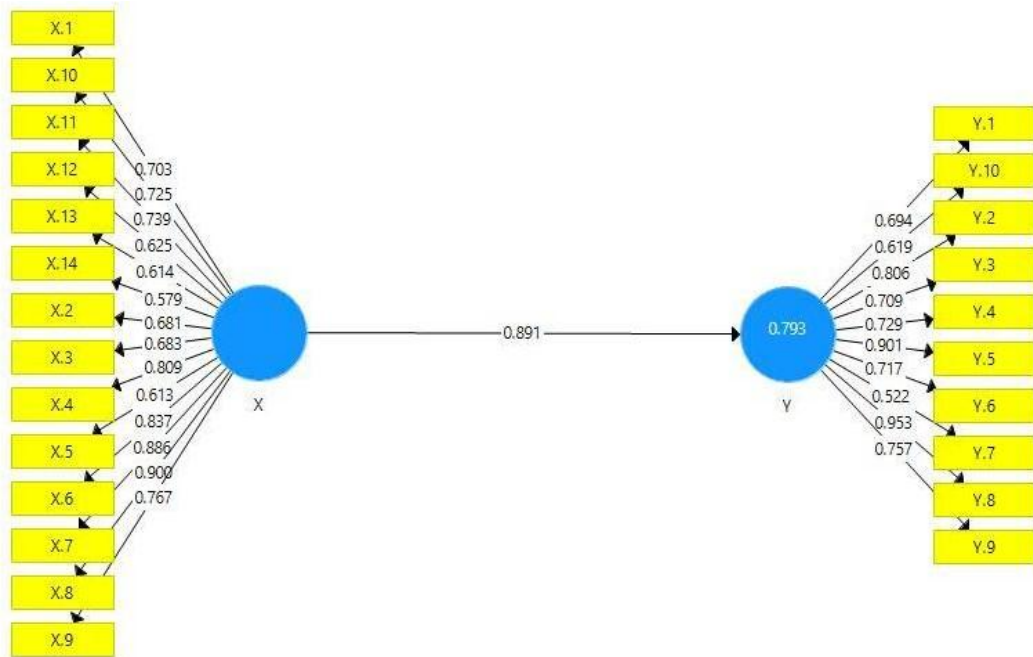
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.861	10

Case Processing Summary

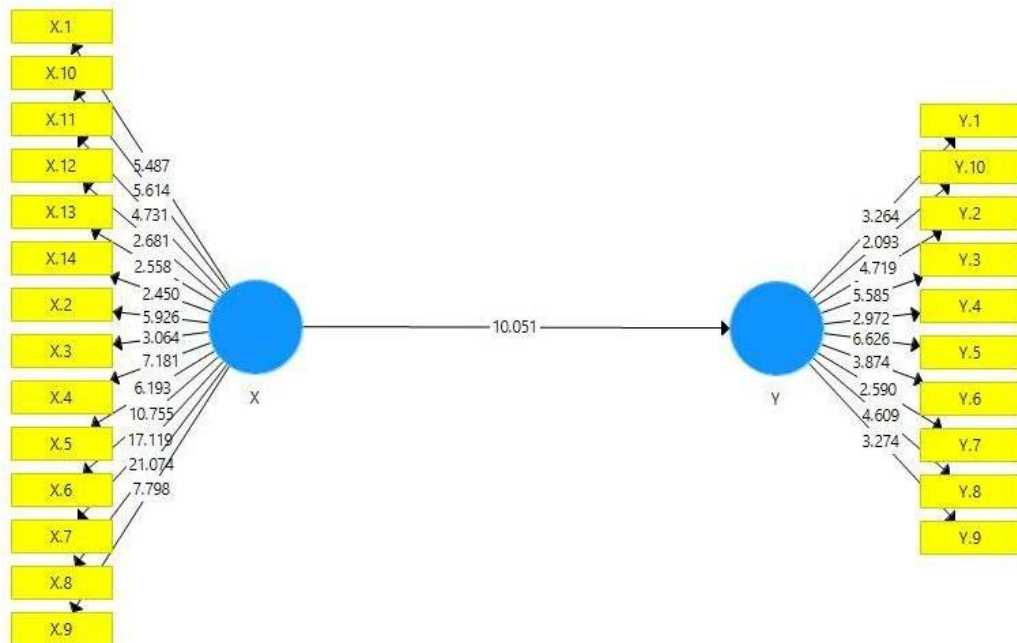
		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Hasil Inner/Outer Model



Hasil Path Coefficient



Hasil Uji Validitas Penerapan Audit Investigatif (X)

		Correlations														Penerapan Audit Investigatif (X)
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13	X.14	
X.1	Pearson Correlation	1	.882**	.404	.733**	.522*	.630**	.882**	.733**	.630**	.733**	.467*	.289	.404	.577**	.845**
	Sig. (2-tailed)		.000	.077	.000	.018	.003	.000	.000	.003	.000	.038	.217	.077	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.2	Pearson Correlation	.882**	1	.336	.630**	.373	.524*	.762**	.630**	.762**	.630**	.378	.218	.336	.509*	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000		.147	.003	.105	.018	.000	.003	.000	.003	.100	.355	.147	.022	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.3	Pearson Correlation	.404	.336	1	.404	.380	.336	.336	.404	.336	.404	.404	.490*	.608**	.793**	.596**
	Sig. (2-tailed)	.077	.147		.077	.098	.147	.147	.077	.147	.077	.077	.028	.004	.000	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.4	Pearson Correlation	.733**	.630**	.404	1	.522*	.630**	.882**	.733**	.630**	1.000**	.733**	.289	.404	.577**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.077		.018	.003	.000	.000	.003	.000	.000	.217	.077	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.5	Pearson Correlation	.522*	.373	.380	.522*	1	.592**	.592**	.522*	.373	.522*	.522*	.201	.099	.302	.633**
	Sig. (2-tailed)	.018	.105	.098	.018		.006	.006	.018	.105	.018	.018	.395	.679	.196	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.6	Pearson Correlation	.630**	.524*	.336	.630**	.592**	1	.762**	.882**	.762**	.630**	.630**	.491*	.336	.509*	.832**
	Sig. (2-tailed)	.003	.018	.147	.003	.006		.000	.000	.000	.003	.003	.028	.147	.022	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

X.7	Pearson Correlation	.882**	.762**	.336	.882**	.592**	.762**	1	.882**	.762**	.882**	.630**	.218	.336	.509*	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.147	.000	.006	.000		.000	.000	.000	.003	.355	.147	.022	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.8	Pearson Correlation	.733**	.630**	.404	.733**	.522*	.882**	.882**	1	.882**	.733**	.733**	.289	.404	.577**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.077	.000	.018	.000	.000		.000	.000	.000	.217	.077	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.9	Pearson Correlation	.630**	.762**	.336	.630**	.373	.762**	.762**	.882**	1	.630**	.630**	.218	.336	.509*	.808**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.147	.003	.105	.000	.000	.000		.003	.003	.355	.147	.022	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.10	Pearson Correlation	.733**	.630**	.404	1.000**	.522*	.630**	.882**	.733**	.630**	1	.733**	.289	.404	.577**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.077	.000	.018	.003	.000	.000	.003		.000	.217	.077	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.11	Pearson Correlation	.467*	.378	.404	.733**	.522*	.630**	.630**	.733**	.630**	.733**	1	.289	.404	.577**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.038	.100	.077	.000	.018	.003	.003	.000	.003	.000		.217	.077	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.12	Pearson Correlation	.289	.218	.490*	.289	.201	.491*	.218	.289	.218	.289	.289	1	.490*	.667**	.488*
	Sig. (2-tailed)	.217	.355	.028	.217	.395	.028	.355	.217	.355	.217	.217		.028	.001	.029
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.13	Pearson Correlation	.404	.336	.608**	.404	.099	.336	.336	.404	.336	.404	.404	.490*	1	.793**	.565**
	Sig. (2-tailed)	.077	.147	.004	.077	.679	.147	.147	.077	.147	.077	.077	.028		.000	.009
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X.14	Pearson Correlation	.577**	.509*	.793**	.577**	.302	.509*	.509*	.577**	.509*	.577**	.577**	.667**	.793**	1	.769**
	Sig. (2-tailed)	.008	.022	.000	.008	.196	.022	.022	.008	.022	.008	.008	.001	.000		.000

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Penerapan	Pearson Correlation	.845**	.760**	.596**	.871**	.633**	.832**	.905**	.896**	.808**	.871**	.768**	.488*	.565**	.769**	1
Audit	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.029	.009	.000	
Investigatif (X)	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.7	Pearson Correlation	.690**	.115	.221	.331	.203	.115	1	.331	.115	.090	.532*
	Sig. (2-tailed)	.001	.630	.350	.154	.390	.630		.154	.630	.706	.016
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.8	Pearson Correlation	.523*	.667**	.577**	1.000**	.793**	.667**	.331	1	.667**	.523*	.918**
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.008	.000	.000	.001	.154		.001	.018	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.9	Pearson Correlation	.294	.375	.289	.667**	.490*	.688**	.115	.667**	1	.294	.650**
	Sig. (2-tailed)	.208	.103	.217	.001	.028	.001	.630	.001		.208	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.10	Pearson Correlation	.231	.294	.226	.523*	.384	.294	.090	.523*	.294	1	.543*
	Sig. (2-tailed)	.328	.208	.337	.018	.094	.208	.706	.018	.208		.013
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Y	Pearson Correlation	.678**	.693**	.681**	.918**	.821**	.693**	.532*	.918**	.650**	.543*	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.001	.000	.000	.001	.016	.000	.002	.013	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).